

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah paparkan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-2017, bahwasannya:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah dalam sepuluh tahun periode analisis menyatakan bahwa lima tahun pertama, rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pandeglang mengalami situasi yang fluktuatif, akan tetapi di tahun keenam sampai tahun kesepuluh rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pandeglang mengalami kenaikan trend. Walaupun demikian Pemerintah Kabupaten Pandeglang masih berada pada pola hubungan instruktif. Artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Hal tersebut dikarenakan sedikitnya partisipasi pendapatan asli daerah bila dibandingkan dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
2. Rasio ketergantungan keuangan daerah pada Kabupaten Pandeglang jika dilihat dari sepuluh tahun terakhir mulai dari tahun 2008 sampai dengan 2017 menjelaskan bahwa kriteria penilaian ketergantungan keuangan daerah berada pada kategori sangat tinggi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Hal tersebut terjadi karena kontribusi pendapatan transfer sangat dominan dibandingkan dengan pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jika di rata-rata kan 74,96% dari total pendapatan daerah dimiliki oleh pendapatan transfer.
3. Rasio derajat desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang selama Sembilan tahun periode pengamatan mulai dari tahun 2008 sampai tahun 2017 berada pada kriteria sangat kurang. Selain itu rasio ini juga mengalami fluktuasi presentase. Sedangkan tahun 2017 berada satu tingkat

M. Rizki, 2019

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2008-2017)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

lebih bagus yakni pada kategori kurang. Kriteria sangat kurang pada rasio derajat desentralisasi fiskal jika dilihat dari formula nya diakibatkan karena sumbangsih pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah sangat minim sekali. Hanya 7,79% dari total pendapatan daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah Kabupaten Pandeglang.

4. Rasio Efektivitas pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008-2017 mengalami fluktuasi rasio kinerja selama sepuluh tahun periode pengamatan, akan tetapi hasil akhir dari proses perhitungan analisis tidak terdapat permasalahan yang menonjol. Bahkan dari hasil perhitungan dan analisis trend menyatakan bahwa rasio efektivitas berada pada kriteria sangat efektif. Hal tersebut terjadi akibat realisasi penerimaan pendapatan asli daerah lebih tinggi dibandingkan target pendapatan asli daerah.
5. Rasio efisiensi pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang pada tahun 2008-2019 jika di rata-rata kan dari sepuluh tahun pengamatan berada pada kriteria kurang efisien karena persentase kurang dari 100% dan lebih dari 90%. Jika dilihat dari formula rasio efisiensi, kriteria kurang terjadi akibat realisasi belanja daerah hampir mencapai angka yang sama terhadap realisasi pendapatan daerahnya. Pada rasio ini semakin sedikit realisasi belanja untuk mendapatkan sumber pendapatan maka semakin baik rasio efisiensinya.
6. Rasio Aktivitas belanja pembangunan dan rasio aktivitas belanja rutin pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang tahun analisis 2008-2017 dapat disimpulkan bahwa pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang lebih condong terhadap belanja rutin daripada belanja pembangunan yang memiliki jangka yang panjang. Hal tersebut dibuktikan dengan 73% belanja rutin dan 27% belanja dialokasikan untuk pembangunan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah daerah kabupaten pandeglang tahun 2008-2017) bahwa dalam hal pendapatan asli daerah masih tergolong sangat

M. Rizki, 2019

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2008-2017)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kurang untuk berkontribusi dominan kepada total pendapatan daerahnya. Keterbatasan selanjutnya bahwa terdapat keterbatasan analisis kinerja keuangan dilakukan hanya satu Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Indonesia, selanjutnya Tidak ada faktor lain untuk menambahkan khasanah analisis kinerja keuangan pemerintah daerah, dan Rasio kinerja keuangan pemerintah daerah hanya menggunakan enam analisis kinerja keuangan. Maka dari itu peneliti berkenan memberikan saran kepada:

1. Pemerintah Daerah

Saran kepada pemerintah daerah adalah pemerintah daerah di Indonesia khususnya pemerintah daerah kabupaten pandeglang harus mengalokasikan belanja daerah kepada belanja pembangunan daripada belanja rutin, agar pemerintah daerah mendapatkan penerimaan dari hasil belanja langsung (belanja pembangunan) supaya pendapatan asli daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap total pendapatan daerah, serta dapat menjalankan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memerintahkan pemerintah daerah harus mampu menjalankan desentralisasi dengan memiliki kemandirian keuangan daerahnya masing-masing.

2. Peneliti

Saran terhadap penelitian ini adalah menggunakan uji statistik agar hasil dari perhitungan memiliki dasar yang kuat dan penggunaan bahasa sebagai narasi analisis harus lebih formal dan terperinci serta terstruktur agar pembaca dapat memahami dengan baik dan komprehensif.

3. Peneliti Selanjutnya

Saran kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan analisis dengan topik yang sama bahwa diharapkan agar lebih diperbanyak pemerintah daerah yang akan dianalisis, lalu memunculkan faktor lain untuk menambahkan pengaruh dari kinerja keuangan pemerintah daerah dan analisis rasio keuangan pemerintah daerah harus mendalam dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat daripada penelitian oleh penulis ini.